

MENGULAS PENYEBAB BANJIR DI DAERAH KARYA CILINCING

Nadya Nurhaliza, Afifah Azzahra, Juventus Simangunsong, Berlianti
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sumatera Utara

Email: nadyanurhaliza10@students.usu.ac.id, afifahazzahra16@students.usu.ac.id,
juventussimangunsong@gmail.com, berlianti@usu.ac.id

ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu bentuk bencana alam yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab banjir di Komplek Cilincing Indah, Kecamatan Medan Barat, serta mengevaluasi mitigasi yang dilakukan masyarakat dan peran pemerintah setempat. Menggunakan metode deskriptif dengan wawancara langsung, penelitian ini menemukan bahwa buruknya sistem drainase, curah hujan tinggi, dan kurangnya perhatian pemerintah menjadi faktor utama penyebab banjir. Masyarakat telah melakukan mitigasi mandiri, seperti membersihkan selokan, tetapi upaya ini bersifat sementara. Meski warga melakukan mitigasi mandiri, seperti membersihkan got, upaya ini hanya bersifat sementara. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, peran pemerintah sangat penting dalam memperbaiki infrastruktur dan mengurangi risiko bencana. Studi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Banjir, Saluran Air, Tempat Tinggal, Masyarakat

Abstract

Flooding is a natural disaster that significantly impacts urban communities. This study aims to analyze the causes of flooding in Komplek Cilincing Indah, Kecamatan Medan Barat, and evaluate the mitigation efforts by the local community and the role of the government. Using a descriptive method with direct interviews, the research found that poor drainage systems, high rainfall, and lack of government attention are the primary causes of flooding. Residents have engaged in self-mitigation efforts, such as cleaning drainage channels, but these measures are temporary. According to Law No. 24 of 2007, the government plays a critical role in improving infrastructure and reducing disaster risks. This study emphasizes the importance of collaboration between the government and the community to enhance infrastructure and disaster preparedness, ensuring sustainable flood risk reduction.

Keywords: *Flooding, waterways, housing, community*

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234ejf.677.

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu fungsi pemerintah dalam hal ini adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi akibat bencana. Menurut (Hermon, 2018) Bencana merupakan suatu gejala alamiah dan non-alamiah yang sangat meresahkan masyarakat akibat hilangnya kenyamanan, keamanan, dan ketentraman kehidupannya. Diperlukan tanggap

darurat bencana yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan, dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Salah satu fungsi pemerintah dalam hal ini adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Penulis mengambil studi kasus di Kecamatan Medan Barat, tepatnya perumahan warga di dekat komplek Cilincing Indah yang dekat sekali dengan sungai. Hal ini akan mengidentifikasi bagaimana warganya melakukan mitigasi dari bencana banjir tersebut dan bagaimana peran dari pemerintah setempat. Dalam hal ini kami mengambil contoh bencana banjir. Pengertian banjir menurut Yohana, dkk (2017) adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya penumpukan air yang jatuh dan tidak dapat ditampung oleh tanah. Peristiwa alam, seperti banjir ini bukanlah hal yang baru terjadi pada suatu wilayah perkotaan. Banjir yang terjadi di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Medan merupakan siklus tahunan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujana dan Ibrahim, 1989:65). Penelitian deskriptif ini fokus pada pemecahan masalah-masalah yang betul-betul terjadi di lapangan dan mendeskripsikan hasil di lapangan sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Penelitian deskriptif lebih berfungsi untuk pemecahan praktis dari pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Peneliti mengambil pengambilan riset dalam penelitian ini di Jl. Karya Cilincing (dalam Komp. Cilincing Indah) 3°37'06.7"N 98°40'02.3"E. Pengambilan riset ini dengan menggunakan metode wawancara dengan masyarakat sekitar.

HASIL PEMBAHASAN

Banjir terjadi dikarenakan akibat dari debit curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan air meluap tinggi dan memasuki pemukiman rumah masyarakat. Air yang meluap karena aliran air yang berada di selokan tidak berjalan dengan semestinya, menghasilkan curah hujan yang tinggi tidak dapat menampung aliran selokan. Peneliti mengambil ini data riset pada lokasi di pemukiman masyarakat di dalam Komp. Karya Cilincing Indah lebih tepatnya diujung komplek.

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

Rencana aksi pengurangan resiko bencana ini meliputi rencana aksi nasional yang di koordinasi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Sebelum melakukan penanggulangan bencana maka dilakukannya mitigasi. Menurut UU No. 24 2007 tentang penanggulangan bencana Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut Permendagri No. 33 2006 tentang pedoman umum mitigasi bencana, mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya di dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan penganggulan bencana dalam hal ini tanggap darurat, maka ada tiga (3) hal yang harus diperhatikan serta di dorong, yakni ; Pertama, dalam hal membangun kesiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana. Kedua, membangun mekanisme koordinasi kelembagaan antara lembaga pemerintah dalam menengani bencana dan usaha untuk mengurangi resiko bencana. Dan Ketiga, mensinergikan antara stakeholders yang

berkaitan dengan penganggulan bencana merupakan hal yang sangat penting. (Maulana, 2017).

Bencana alam merupakan bencana yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat yang dimana menjadi beban tersendiri. Tepat di daerah kecamatan Medan Barat, kelurahan Karang Berombak, Sumatera Utara, adanya bencana alam yaitu banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Walaupun banjir terus melanda di daerah sekitar, memaksakan warga untuk tetap bertahan di daerah sekitar karena hanya di tempat tersebut mereka bertempat tinggal. Tempat tinggal yang kini mereka tinggalkan, memiliki potensi yang tinggi untuk banjir karena daerah tersebut berada di ujung Komplek Cilincing Indah dan juga tidak adanya perbaikan dalam pembuatan saluran air.

Bencana alam yang terjadi di masyarakat yang berada di Ujung Komplek Cilincing Indah itu merupakan bencana alam yang sudah lama dan menjadi keresahan warga sekitar. Keresahan yang dialami warga sekitar sudah sangat lama, tetapi tidak ada ketindaklanjutan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembuatan selokan di sekitar. Warga yang berada tinggal di ujung kompleks sudah melakukan pengajuan proposal beberapa kali dan langsung ditujukan oleh kepada pihak pemerintah, tetapi tidak ada proses lanjutan untuk melakukan perbaikan.

Pemukiman masyarakat yang berada di ujung Komp. Karya Cilincing Indah sangat dirugikan, dikarenakan sulitnya dalam pembuatan aliran selokan. Tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Adanya tindakan yang dilakukan untuk melakukan mitigasi bencana banjir di pemukiman masyarakat ujung Komp. Karya Cilincing Indah tidak mengubah situasi dan kondisi ketika debit curah hujan yang tinggi. Adapun tindakan yang dilakukan masyarakat sekitar dan bersama kepala lingkungan ialah hanya tindakan kecil, tidak dengan tindakan besar yang dapat mengubah kondisi masyarakat yang lebih baik ketika sedang dilanda hujan terus-menerus dengan debit air hujan yang tinggi.

Kondisi ini semakin memburuk karena pemerintah setempat tidak memberikan perhatian yang cukup. Warga telah berkali-kali protes dan mengajukan permohonan untuk perbaikan infrastruktur seperti selokan dan sistem drainase, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang memadai. Akibatnya, penduduk sekitar harus bergotong-royong membersihkan got dan mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan tindakan pencegahan banjir. Namun, masalah banjir selalu muncul setiap musim hujan karena upaya tersebut hanya sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang.

Terutama masyarakat yang tinggal di daerah ujung Komplek Cilincing Indah membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mengambil tindakan yang nyata untuk mengatasi masalah ini. Infrastruktur masyarakat yang berada di ujung Komplek Karya Cilincing Indah ini tidak memadai seperti selokan atau drainase. Masyarakat sudah lelah dalam menanggapi permasalahan banjir seperti ini dan sudah menjadi langganan banjir di pemukiman masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Banjir di ujung Komplek Cilincing Indah, Kecamatan Medan Barat, disebabkan oleh curah hujan tinggi dan buruknya sistem drainase, diperparah oleh minimnya respons pemerintah. Meski masyarakat melakukan mitigasi mandiri seperti membersihkan got, upaya ini bersifat sementara dan tidak mampu mengatasi akar masalah.

Peran pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sangat penting untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesadaran mitigasi, dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Sayangnya, kurangnya perhatian dan koordinasi menyebabkan banjir menjadi masalah rutin yang merugikan masyarakat.

Solusi yang diperlukan adalah komitmen nyata dari pemerintah untuk membangun sistem drainase yang memadai dan menerapkan kebijakan berbasis mitigasi risiko guna mengurangi dampak banjir dan meningkatkan kualitas hidup warga.

SARAN

1. **Perbaikan Infrastruktur:** Pemerintah daerah perlu segera memperbaiki dan meningkatkan kapasitas saluran drainase di Komplek Cilincing Indah untuk mencegah banjir yang berulang.
2. **Pelibatan Warga:** Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus diperkuat melalui program edukasi mitigasi bencana dan pelibatan warga dalam perencanaan tata ruang berbasis risiko.
3. **Penganggaran Prioritas:** Alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
4. **Pemantauan dan Evaluasi:** Diperlukan sistem pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas infrastruktur dan kebijakan yang diterapkan dalam mengurangi risiko banjir.
5. **Peningkatan Koordinasi:** Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi yang efektif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait untuk menyusun rencana aksi mitigasi yang komprehensif.

Pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang responsif sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah banjir secara berkelanjutan di wilayah Karya Cilincing.

REFERENSI

- Effendi, K., Vanesa, K. D., Hariyani, E., Ritonga, A. F. A., & Siregar, M. A. G. (2023). Analisis penanggulangan banjir dan kesiapsiagaan dalam mitigasi banjir di Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(3), 101–115. <https://doi.org/10.55606/innovation.v1i3.1490>
- Eldi. (2020). Analisis penyebab banjir di DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1057–1064. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.203>
- Miftakhudin, S. (2021). Strategi penanganan banjir rob Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i.142>
- Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 3(1). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4613>
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.